



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)
 Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023
 Halaman Koran : 12

Keterbukaan Informasi Publik Kota Cilegon Paling Rendah

CILEGON, (KB).-

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Kota Cilegon, mulai 2020 sampai dengan 2022 masih rendah. Bahkan berada di urutan akhir dari seluruh kabupaten/kota Se-Banten. Informasi yang berhasil dihimpun, berdasarkan surat keputusan (SK) Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten nomor 096/SK-BP/KIBANTEN/XI/2019, penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kota Cilegon hanya berada di angka 60,34 persen.

Sementara, pada 2022, KIP Banten mengeluarkan surat bernomor 014/Kep-KI-BANTEN/XI/2022. Di mana hasil penilaiannya Kota Cilegon mencapai 60,05 persen. Tentu saja hal ini sangat kurang sekali. Meski dalam keterangan cukup informatif. Karena berturut-turut berada di peringkat bawah.

Adanya hasil keterbukaan publik yang menempati urutan bawah, membuat sejumlah aktivis di Kota Cilegon angkat bicara. Salah satunya, adalah Hamami Hambali. Di mana dia menyayangkan hasil buruk penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

"Kalau melihat data dari

tahun ke tahun, ini tidak ada perubahan sama sekali. Di mana memang keterbukaan informasi publik kurang dan seharusnya ada pembenahan di semua OPD tersebut," kata Hamami, Ahad (8/1/2023).

Ia menuturkan, apa yang selama ini menjadi salah satu jargon pasangan Helldy-Sanuji, hanyalah isapan jempol saja. Di mana pasangan Helldy-Sanuji akan melakukan transparansi keterbukaan publik. Apalagi sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Masyarakat Cilegon berhak tahu soal pengelolaan anggaran. Apalagi ada isu temuan di salah satu UPTD mencapai Rp 1 miliar. Apa yang harus ditutup-tutupi, itu audit bagaimana dengan belanja barang dan jasa," ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan sejak Senin (24/10/2022) hingga Senin (12/12/2022). Setelah itu hasilnya akan diserahkan rekomendasi-rekomendasi yang harus diperbaiki oleh setiap OPD. Salah satunya membayar kelebihan pembayaran dan perbaikan Sistem Pengendalian In-

tern (SPI).

"Sudah enggak zamannya lagi harus ditutup-tutupi, buka saja siapa yang bermasalah dan ada temuan. Solusinya seperti apa," ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Lembaga Kajian Publik Cilegon (LKPC) Bidang Hubungan Kelembagaan Juhana. Ia menilai, transparansi publik merupakan sebuah keharusan yang dimiliki pemerintah.

"Artinya, kalau berturut-turut tidak ada perubahan, ngapain saja selama ini pejabatnya. Kami juga masyarakat Cilegon berhak atas informasi-informasi anggaran yang selama ini ada di Pemkot Cilegon," tuturnya.

Informasi yang tertutup, menurut dia, akan semakin menguatkan apabila ada sesuatu yang direncanakan dan bisa saja, ada sebuah kesalahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi tutup dan menutupi soal temuan atau apapun.

"Buka saja, ini sudah zaman transparansi. Karena pejabat sudah disumpah dan penandatanganan pakta integritas bukan seremonial belaka," katanya. (H-45)***